

RENCANA KERJA
(RENJA)

INSPEKTORAT
KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2020 telah selesai disusun yang merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)" dan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Tangerang selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Tangerang, besar harapan kami agar RENJA ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Tangerang dan yang memerlukannya, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin

Tigaraksa, Agustus 2019

INSPEKTUR



Drs. H. Uyung Mulyardi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19620605 198503 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematikan Penulisan	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN LALU	4
	2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun lalu dan capaian Rebstra Inspektorat Kabupaten Tangerang	5
	2.2 Analisa kerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang	9
	2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang	11
	2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD	12
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	16
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG	17
	3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	17
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang	18
	3.3 Program dan Kegiatan	19
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB V	PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020	5
2.2	Rencana Startegi Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023	9
2.3	Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Tangerang	10
2.4	Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020	13
2.5	Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2020	16
3.1	Hubungan Priotitas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah	17
3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2019	19
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2020 memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan renja Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tangerang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2020, bertujuan untuk menunjukkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman bagi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat;
2. Penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2019-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog/Keg s.d Thn 2018	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun Lalu			Target Prog. Keg (RENJA PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog/Keg s.d Thn 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
300	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
3002	Pengawasan										
300201	INSPEKTORAT										
...16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Prosentase Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan	%	76%		84%	76.49%	91.06%	82%	82%	100%
16.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan internal berkala	LHP	500 LHP		100 LHP	100 LHP	100%	100 LHP	100 LHP	100%
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	BAP LHP	-		350 BAP TLHP	350 BAP TLHP	100 %	-	-	-
	Penanganan pemeriksaan Kasus di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kasus	LHP	-		30 LHP	-	-	-	-	-
	Penanganan pemeriksaan Khusus dilingkungan pmda	Jumlah laporan hasil pengawasan Khusus	LHP	-		54 LHP	64 LHP	118.5 %	-	-	-
	Evaluasi Berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah frekwensi evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Rekon & Gelar Pengawasan	-		3 Rekon & 1 Gelar Pengawasan	3 Rekon & 1 Gelar Pengawasan	100 %	-	-	-
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	Jumlah frekwensi evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	Rekon	-		4 Kali Rekon	4 Kali Rekon	100 %	-	-	-
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan reuiu LKIP dan LKD Kabupaten Tangerang	Dokumen	-		2 Dok	2 Dok	100 %	-	-	-
	Reuiu RKA Kabupaten Tangerang	Jumlah SKPD terkait Reuiu RKA	OPD	62		62 OPD	62 OPD	100 %	-	-	-
	Fasilitasi tim saber pungli	Jumlah OPD yang terkait kegiatan saber pungli	OPD	-		62 OPD	62 OPD	100 %	-	-	-
	Fasilitasi Pembentukan Tunas Integritas	Jumlah OPD yang telah mengikuti fasilitasi pembentukan tunas integritas	Orang	15		15 Orang	0	0%	-	-	-
	Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang telah mengikuti fasilitasi pembangunan zona integritas	OPD	5		5 OPD	5 OPD	100 %	-	-	-
16.014	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah OPD yang mengikuti	OPD	63 OPD		6 OPD	6 OPD	100 %	18 OPD	18 OPD	100 %

		sosialisasi Survei Persepsi Integritas									
16.016	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Berita Acara tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan evaluasi pengawasan BPK-RI	BAP TLHP	1077 BAP TLHP		-	-	-	318	250	78 %
16.017	Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kasus dan khusus	LHP	294 LHP		-	-	-	84	60	71 %
...17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		%	100 %		58 %	100 %	172 %	82 %	82 %	100 %
17.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	76	Orang		76	76	100 %	48	48	100 %
17.002	Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas APIP	76	Orang		76	76	100 %	61	61	100 %
17.003	Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	56	Laporan		56	57	100 %	56	52	92.85 %
...18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Prosentase tertib administrasi pemerintah dan pengelola keuangan pada OPD di lingkungan pemerintah daerah	%	80 %		40 %	80 %	200 %	50 %	50 %	100 %
	Penyusunan laporan harta kekayaan PNS (LHKASN)	Jumlah Pejabat yang melaporkan LHKPN & LHKASN	Orang	1660		317	317	100 %	323	323	100 %
	Probit Audit	Jumlah OPD yang pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	OPD	11		1	0	0 %	2	2	100 %
	Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah	Jumlah OPD yang mencapai kualitas sesuai sistem pengendalian internal pemerintah	OPD	63		36	36	100 %	36	36	100 %
	Fasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah SKPD yang di ikut sertakan pada bimtek penyelenggaraan SPIP	OPD	-		14	14	100 %	-	-	-
	Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah tingkat organisasi perangkat daerah	Jumlah SKPD yang diikuti sertakan diklat pengendalian korupsi	OPD			36	36	100 %			
	Coaching Clinic	Jumlah capaian konsultasi OPD yang sudah terselesaikan	OPD	63		-	-	-	63	63	100 %

Pengembangan Tunas dan zona integritas	Jumlah OPD yang telah mengembangkan Tunas dan Zona Integritas	OPD	63		-	-	-	5	5	100 %
Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah OPD yang di Review Dana Alokasi Khusus (DAK) nya	OPD	8		-	-	-	8	8	100 %
Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang	Jumlah dokumen review RKPD Kabupaten Tangerang	Dokumen	9		-	-	-	9	9	100 %
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	OPD	63		-	-	-	63	63	100 %
Evaluasi Laporan Kinerja dan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan reviu LKIP dan reviu LKD Pemerintah Daerah	Dokumen	10		-	-	-	2	2	100 %

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA INSPEKTORAT Tahun 2019 hingga disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH:

Pada kegiatan Fasilitasi Pembentukan Tunas Integritas APBD TA. 2019 yang dilaksanakan pada Triwulan III

Untuk kegiatan Fasilitasi Pembentukan Tunas Integritas tidak tercapai target kinerja (0%) hal tersebut dikarenakan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena narasumber dari KPK maupun Kemenpan RB sampai dengan akhir tahun anggaran atau Triwulan IV tidak dapat memberikan kejelasan untuk waktu pelaksanaan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH

Pada kegiatan Probit Audit APBD TA. 2019 yang dilaksanakan pada TW I, II, III, IV dapat dijelaskan bahwa kegiatan Probit Audit tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada permintaan dari OPD untuk dilakukan pendampingan pada kegiatan yang dilaksanakan maupun perintah dari pimpinan

- b. Program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran adalah :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam hal indikator kinerja pada kegiatan :

- Pelaksanaan Pengawasan Internal
- Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- Penanganan pemeriksaan kasus dilingkungan pemda
- Penanganan pemeriksaan khusus dilingkungan pemda
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI
- Pengendalian manajemen kebijakan KOH
- Review RKA Kabupaten Tangerang
- Fasilitasi Tim Saber Pungli
- Penyusunan Pelaporan Tim Evaluasi & pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (TEPRA)
- Penyusunan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang
- Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas
- Survei Penilaian Integritas (SPI)

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dalam indikator Kegiatan :

- Laporan Harta Kekayaan PNS
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Fasilitasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tingkat OPD

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %
		Prosentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
		Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tangerang	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.0811	3.1005	3.1522	3.1808	3.2005
Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	71.50	72.00	73.00	74.00	75.00
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tangerang sesuai dengan RENSTRA INSPEKTORAT tertuang dalam capaian sasaran Strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

No	Indikator	Target RENSTRA					Realisasi Capaian (2019)	Proyeksi		Catatan Analisis
		2019	2020	2021	2022	2023		2020	2021	
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	84 %	85 %	86 %	87 %	88 %	82.55 %	85 %	86 %	Prosentase Capaian = $\frac{RT}{TL} \times 100 \%$ TL • Rekomendasi Temuan (RT) = 1427 • Tindak Lanjut Rekomendasi (TL) = 1178
2	Prosentase penurunan jumlah temuan hasil pemeriksaan	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	42 %	30 %	35 %	Prosentase Capaian = $\frac{TTB}{TTL} \times 100 \%$ TTL • Temuan tahun berjalan (TTB) = 19 • Temuan tahun lalu (TTL) = 45
3	Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Prosentase Capaian = $\frac{S}{P} \times 100 \%$ P • Jumlah pengaduan yang diterima (P) = 5 • Jumlah pengaduan yang (S) = 5
4	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.0811	3.1005	3.1522	3.1808	3.2005	3.0811	3.1005	3.1522	Hasil QA dari Tim BPKP
5	Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tangerang	71.50	72.00	73.00	74.00	75.00	71.50	72.00	73.00	Hasil reuiu Inspektorat
6	Level Kapabilitas APIP	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	Hasil QA dari Tim BPKP

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi, yaitu :

a. Faktor Pendorong

- ✚ Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tangerang yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 86 Tahun 2016
- ✚ Mekanisme kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang yang berorientasi kepada pencapaian kinerja
- ✚ Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staff Inspektorat Kabupaten Tangerang dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi
- ✚ Adanya kerja sama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan
- ✚ Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal efektif dan efisien

b. Faktor Penghambat

- ✚ Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah objek (perangkat daerah, desa, kelurahan, objek lainnya) yang diperiksa
- ✚ Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan
- ✚ Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

- ✚ Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan perangkat daerah belum optimal
- ✚ Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

2.3 ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tangerang tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2019 = B) walaupun tantangan kedepan terhadap SAKIP Kabupaten Tangerang masih harus berbenah untuk dapat mempertahankan nilai tersebut atau meningkatkannya.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *Quality Assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan
4. Maturitas Kapabilitas APIP di awal tahun 2020 harus ada kenaikan dari Level 3 (nilai 3,0602) menjadi level 3 (nilai 3,0811) dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *Quality Assurance* bagi Bupati Tangerang

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2020, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

TABEL 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

RANCANGAN RKPD						ANALISA HASIL KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
...16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH					PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH					
16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tangerang	Tersedianya laporan hasil pengawasan Internal Secara Berkala	100 LHP	100.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tangerang	Jumlah laporan pengawasan umum, ADD, Dana BOS/BOSDA, Audit Ketaatan, Audit Fisik Konstruksi	151 LHP	1.132.500	Perubahan indikator kegiatan dan pagu indikatif
16.009	Peningkatan Kinerja Tim Saber Pungli	Tangerang	Tersedianya fasilitasi Tim Saber Pungli	62 OPD	420.000.000	Peningkatan Kinerja Tim Saber Pungli	Tangerang	Jumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang bersih, jujur dan adil	63 OPD	411.750.000	Perubahan indikator kegiatan dan pagu indikatif
16.010	Penyusunan pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (TEPRA)	Tangerang	Tersedianya laporan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (TEPRA)	63 OPD	30.000.000	Penyusunan pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (TEPRA)	Tangerang	Jumlah OPD terkait pengawasan atas realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah	63 OPD	13.200.000	Perubahan indikator kegiatan target capaian dan pagu indikatif
16.013	Penyusunan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang	Tangerang	Tersedianya laporan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang	Tangerang	Meningkatnya kualitas laporan pengendalian pengelolaan keuangan & barang milik daerah	2 Dok	43.700.000	Perubahan indikator kegiatan dan pagu indikatif
16.014	SPI	Tangerang	Meningkatnya Survey Penilaian Integritas (SPI)	18 OPD	150.000.000	SPI	Tangerang	Meningkatnya Survey Penilaian Integritas (SPI)	18 OPD	350.000.000	Perubahan pagu indikatif

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG - 2020

16.016	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tangerang	Tersedianya laporan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan & evaluasi pengawasan BPK-RI	318 BA TLHP	190.000.000	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tangerang	Jumlah laporan Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	310 BA TLHP	134.470.000	Perubahan indikator kegiatan target capaian dan pagu indikatif	
16.017	Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah	Tangerang	1. Jumlah laporan pengawasan pemeriksaan kasus 2. Jumlah laporan pengawasan pemeriksaan khusus	30 LHP 64 LHP	18.000.000	Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah	Tangerang	1. Jumlah laporan pengawasan pemeriksaan kasus 2. Jumlah laporan pengawasan pemeriksaan khusus	30 LHP 64 LHP	18.000.000		
...17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN					PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						
17.001	Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tangerang	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	70 Orang	300.000.000	Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tangerang	Jumlah peserta diklat pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	48 Orang	410.000.000	Perubahan target capaian dan pagu indikatif	
17.002	Peningkatan Kinerja Peningkatan kapabilitas APIP	Tangerang	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas APIP	76 Orang	380.000.000	Peningkatan Kinerja Peningkatan kapabilitas APIP	Tangerang	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	61 Orang	410.000.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif	
17.003	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Tangerang	Jumlah Auditor yang difasilitasi Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	56 Laporan	140.000.000	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	Tangerang	Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian	52 Laporan	53.075.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif	
...18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH						
18.002	Laporan Harta Kekayaan PNS	Tangerang	Jumlah pejabat yang melaporkan LHKPN dan LHKS	323 Orang	40.000.000	Laporan Harta Kekayaan PNS	Tangerang	1. Jumlah OPD terkait aksi implementasi penyelenggaraan negara yang bebas KKN 2. Jumlah OPD terkait aksi implementasi	128 LHKPN 195 LHKS	23.500.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif	

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG - 2020

								penyelenggaraan negara yang bebas KKN			
18.004	Probity Audit	Tangerang	Jumlah OPD yang pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2 OPD	75.000.000	Probity Audit	Tangerang	Jumlah OPD yang pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2 OPD	99.000.000	Perubahan pagu indikatif
18.005	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tangerang	Jumlah SKPD terkait penyelenggaraan pengendalian korupsi	63 OPD	325.000.000	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Tangerang	Jumlah OPD yang mencapai kualitas sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	63 OPD	127.377.000	Perubahan indikator kegiatan dan pagu indikatif
18.009	Choaching Clinic	Tangerang	Jumlah OPD yang memanfaatkan coaching Clinic	63 OPD	400.000.000	Choaching Clinic	Tangerang	Jumlah capaian konsultasi OPD yang sudah terselesaikan	63 OPD	8.960.000	Perubahan indikator kegiatan dan pagu indikatif
18.010	Pengembangan Tunas dan Zona Integrasi	Tangerang	Jumlah OPD yang telah mengembangkan Tunas dan Zona Integrasi	25 OPD	275.000.000	Pengembangan Tunas dan Zona Integrasi	Tangerang	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan negara yang bebas KKN	5 OPD	151.900.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif
18.011	Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tangerang	Jumlah OPD yang direviu DAK nya	9 OPD	300.000.000	Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	Tangerang	Tercapainya pelaksanaan Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	8 OPD	9.840.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif
18.012	Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang	Tangerang	Jumlah dokumen reuiu RKPDP Kabupaten Tangerang	1 Dok	575.000.000	Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang	Tangerang	Tersedianya Laporan terkait Review RKA, DPA, RKA-Perubahan, DPA-Perubahan,KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan, RKPDP, RKPDP Perubahan, LPPD	9 Dok	477.900.000	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif
18.013	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Tangerang	Jumlah laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	1 Dok	150.000.000	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Tangerang	Tercapainya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	63 OPD	88.397.500	Perubahan indikator kegiatan,Perubahan target capaian dan pagu indikatif

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG - 2020

18.014	Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan	Tangerang	Tercapainya pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan	2 Dok	551.200.000		Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan	Tangerang	Tercapainya pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan	2 Dok	551.200.000	
--------	--	-----------	--	-------	-------------	--	--	-----------	--	-------	-------------	--

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
TIDAK ADA USULAN					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2020-2024 menggariskan Visi Indonesia tahun 2020 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2020 berada pada tahap jangka menengah yang ke-satu yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan Rancangan Awai RKP Tahun 2020 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
1	Ekonomi	
2	Lingkungan	
3	Politik	
4	Hukum	
5	Pertahanan & Keamanan	
6	Tata Kelola & Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan : a. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel b. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik
7	Kesejahteraan Rakyat	
8	Kewilayahan	
9	Kelautan	

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi INSPEKTORAT Kabupaten Tangerang maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada **Prioritas ke-6** yaitu **Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA INSPEKTORAT tahun ke 2 untuk periode 2019-2023, yaitu :

- **Tujuan**
 - a. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Terwujudnya tata kelola Inspektorat yang baik

- **Sasaran**
 - a. Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan yang efektif
 - b. Meningkatnya maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten tangerang
 - c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat
 - d. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA Tahun 2019, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tangerang sebagai Quality Assurance dan Consulting bagi Bupati Kabupaten Tangerang terhadap pelaksanaan anggaran Kabupaten Tangerang.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang tahun 2020 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan terdiri dari belanja SKPD dan belanja urusan wajib/pilihan.

Adapun rencana program dan kegiatan dalam belanja program SKPD dan belanja urusan wajib pilihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2020

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan
3002	PENGAWASAN		
.....01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	01.001	Penyediaan jasa surat menyurat
		01.005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		01.007	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		01.008	Penyediaan alat tulis kantor
		01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

		01.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		01.013	Penyediaan makanan dan minuman
		01.014	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		01.015	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
		01.019	Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak

Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan
.....02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
		02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
		02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor
		02.010	Pengadaan mebeleur
		02.011	Pengadaan Alat-alat Kebersihan
		02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kant
		02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		02.043	Penataan Ruang Hijau di SKPD
.....05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		
		05.001	Pendidikan dan pelatihan formal
.....06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
		06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktis realisasi kinerja SKPD
		06.007	Penyusunan Laporan Keuangan
.....07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD		
		07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD
		07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
		07.004	Penyusunan Rencana Kerja
		07.010	Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah
		07.011	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
.....16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH		
		16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
		16.009	Peningkatan Kinerja Tim Saber Pungli
		16.010	Penyusunan pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawas; Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (TEPRA)
		16.013	Penyusunan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang
		16.014	SPI
		16.016	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
		16.017	Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah
.....17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		

		17.001	Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		17.002	Peningkatan Kinerja Peningkatan kapabilitas APIP
		17.003	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
.....18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH		
		18.002	Laporan Harta Kekayaan PNS
		18.004	Probity Audit
		18.005	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
		18.009	Choaching Clinic
		18.010	Pengembangan Tunas dan Zona Integrasi
		18.011	Review Dana Alokasi Khusus (DAK)
		18.012	Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang
		18.013	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
		18.014	Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Tangerang dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)
3002	PENGAWASAN				
.....01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	17.568.000	12.000.000
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.500.000	0
		01.005	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.133.957.200	861.730.000
		01.007	Penyediaan jasa kebersihan kantor	145,800,000	144.000.000
		01.008	Penyediaan alat tulis kantor	194,000,000	194.480.000
		01.009	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86,786,400	88.475.000
		01.010	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17,728,900	17.730.000
		01.012	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26,136,000	30.000.000
		01.013	Penyediaan makanan dan minuman	196.949.500	147.449.500
		01.014	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.625.942.800	1.100.000.000
		01.015	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS	47,500,600	46.542.000
		01.019	Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak	11,049,500	16.250.000
.....02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
		02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	266.757.200	1.020.400.000
		02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	123,500,000	55.500.000
		02.010	Pengadaan mebeleur	84,500,000	145.681.096
		02.011	Pengadaan Alat-alat Kebersihan	22,957,000	23.051.900
		02.021	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	150,130,000	120.700.000
		02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,000,000	70.000.000
		02.043	Penataan Ruang Hijau di SKPD	50,094,000	51.000.000
.....05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
		05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	100.000.000
.....06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
		06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.375.000	10.000.000

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG - 2020

		06.007	Penyusunan Laporan Keuangan	7.000.000	10.000.000
.....07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD				
		07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	10,507,400	12.000.000
		07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	30,280,000	30.400.000
		07.004	Penyusunan Rencana Kerja	6,000,000	7.000.000
			Evaluasi Administrasi Keuangan di Lingkup SKPD	6,100,000	0
		07.010	Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah	7,900,000	7.000.000
		07.011	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	5,900,000	7.000.000
.....16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH				
		16.001	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	47,005,000	1.132.500
		16.009	Peningkatan Kinerja Tim Saber Pungli	416,325,000	411.750.000
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	798,900,000	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	11,500,000	0
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	113,905,000	0
			Penanganan Pemeriksaan Kasus di lingkungan pemerintah daerah	6,475,000	0
			Penanganan Pemeriksaan Khusus di lingkungan pemerintah daerah	14,455,000	0
			Review Rencana Kerja & Anggaran Kabupaten Tangerang	298,980,000	0
			Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan BPK-RI	11,016,500	
			Peningkatan Kinerja Tim Saber Pungli	416,325,000	
		16.010	Penyusunan pelaporan tim evaluasi & pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (TEPRA)	12,600,000	13.200.000
		16.013	Penyusunan Stock Opname dan Cash Opname Kabupaten Tangerang	36,850,000	43.700.000
			Fasilitasi Pembentukan Tunas Integrasi	36,920,000	0
			Fasilitasi Pembangunan Zona Integritas	160,505,000	0
		16.014	Survey Penilaian Integritas (SPI)	150.000.000	350.000.000
		16.016	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	0	134.470.000
		16.017	Penanganan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah	0	18.000.000

.....17	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN				
		17.001	Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
		17.002	Peningkatan Kinerja Peningkatan kapabilitas APIP		
		17.003	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		
.....18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH				
		18.002	Laporan Harta Kekayaan PNS		
		18.004	Probitiy Audit		
			Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah	185,918,500	0
			Evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah tingkat organisasi perangkat daerah	42,060,000	0
		18.005	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0	127,377,000
		18.009	Choaching Clinic	0	8,960,000
		18.010	Pengembangan Tunas dan Zona Integrasi		
		18.011	Review Dana Alokasi Khusus (DAK)	0	9,840,000
		18.012	Review Dokumen Perencanaan Kabupaten Tangerang	0	477,900,000
		18.013	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0	88,397,500
		18.014	Evaluasi Laporan Kinerja dan Review Laporan Keuangan	0	551,200,000

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2019 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang maupun dari APBD Provinsi Banten.

Seluruh program dan kegiatan yang di rencanakan diharapkan akan bisa menutupi seluruh kebutuhan program pengawasan dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang dan RKPD Provinsi Banten yang di sesuaikan juga dengan pagu anggaran yang di terima Inspektorat.

Alokasi Anggaran indikatif pada tahun 2020 yang di peruntukan untuk membiayai seluruh kegiatan dan program kerja dikelompokkan dalam **Belanja Langsung Non Urusan** sebesar **Rp.4.328.389.496,-** (Empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribuempat ratus sembilan puluh enam rupiah) serta **Belanja Langsung Urusan Wajib** sebesar **Rp.3.384.401.000,-** (Tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat puluh juta empat ratus satu ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat. Dengan demikian total anggaran seluruhnya untuk **Belanja Langsung** sebesar **Rp.7.712.790.496,-** (tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribuempat ratus sembilan puluh enam rupiah)

Sebagai input bagi para pemangku kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran pemerintah daerah bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan daerah, masing-masing pemerintah daerah agar mengalokasikan minimal 1 % dari APBD dan meningkat setiap tahunnya secara proporsional untuk anggaran Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Hal ini sejalan dengan **surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 700-462 Tahun 2007**, **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ tanggal 23 September 2008**, **surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/435/A.2/ IJ tanggal 07 April 2017** dan **surat Direktur Jenderal Depdagri Nomor : 700/503/A1/ SJ** tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, disamping itu juga perlu diantisipasi dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Desa yang salah satu implementasinya akan ada bantuan keuangan untuk setiap desa yang nilainya cukup besar, dan ini memerlukan kontrol, agar penyimpangan, penyelewengan, dapat diminimalisir sehingga tujuan mewujudkan pemerintah yang bersih dapat tercapai untuk berbagai level pemerintahan .

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kabupaten Tangerang mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi program peningkatan pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/audit atas instansi pemerintahan dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang di terima akan di prioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/audit mengalami peningkatan.